



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENCIPTAKAN PERSAINGAN PASAR PERBANKAN YANG SEHAT, ANTISIPASI KEHADIRAN BANK DIGITAL

Eka Budiyaniti
Peneliti Madya
eka.budiyaniti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Disrupsi digital tumbuh sangat pesat di masa pandemi Covid-19. Hampir semua sektor mengalami disrupsi digital, termasuk di antaranya sektor perbankan yaitu bank digital. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank digital didefinisikan sebagai bank berbadan hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank digital bisa berupa bank baru atau bank lama yang bertransformasi menjadi bank dengan sistem digital. Bank digital merupakan layanan perbankan elektronik yang ditujukan untuk memberikan nasabah pelayanan yang lebih cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat dilakukan nasabah secara mandiri dengan tetap memerhatikan unsur keamanannya.

Adapun bank digital pertama di Indonesia adalah Jenius dari Bank BTPN yang diluncurkan pada tahun 2016. Kemudian diikuti dengan bank digital lainnya seperti Bank Jago, Wokee dari Bank Bukopin, Blu by Digital BCA, Digibank DBS, TMRW dari Bank UOB, Neobank, LINE Bank, PermataMe dari Bank Permata, SeaBank, Motion dari MNC Bank, dan yang terbaru yaitu Allo Bank.

Bank digital terus bermunculan dan memberikan kemudahan untuk calon nasabah maupun nasabah yang sudah menggunakan. Dengan bank digital ini, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses perbankan hanya dengan jari dan *smartphone*. Melalui bank digital, masyarakat yang mau membuka rekening tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa langsung membuka rekening melalui aplikasi. Bank digital bisa memfasilitasi kebutuhan nasabah dari sisi finansial sampai hiburan hanya dalam satu genggam.

Selain memberikan kemudahan, keuntungan lainnya yang ditawarkan bank digital adalah biaya administrasi yang rendah atau bahkan bebas biaya administrasi termasuk bebas biaya administrasi saat transfer ke rekening bank lain. Dari segi keamanan, fitur keamanan bank digital jauh lebih canggih dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi nasabah akan merasa aman bertransaksi menggunakan bank digital. Bank digital juga memiliki berbagai macam fitur investasi ritel seperti membeli emas secara digital, reksadana, saham hingga obligasi pemerintah dalam satu aplikasi yang sama.

Saat ini, bank digital sudah mulai gencar menyalurkan kredit. Pertumbuhan kredit beberapa bank digital meningkat pesat di awal triwulan I tahun 2022. Bank digital yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah SeaBank. Kredit bank afiliasi dari *e-commerce* Shopee ini telah mencapai Rp9,37 triliun per Maret 2022. Angka ini melesat hingga 451% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2021 yang membukukan kredit Rp1,7 triliun. Selain SeaBank, Bank Jago juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga lima kali lipat pada kuartal I tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank Jago menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah senilai Rp6,14 triliun pada kuartal I tahun 2022.

Pesatnya pertumbuhan kredit bank digital disebabkan oleh kemudahan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memberikan kredit, padahal bunga bank digital lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga kredit bank konvensional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dana yang dihimpun bank digital.

Selain suku bunga kredit yang tinggi, suku bunga simpanan bank digital seperti deposito juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini yang menjadi penarik bagi calon nasabah atau nasabah untuk menyimpan dananya di bank digital. Saat ini bank digital memberikan bunga deposito mencapai 3,5-4,5% per tahun. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan bunga deposito bank konvensional yang hanya mencapai 3,37% per tahun. Bank digital pun akhirnya saling berlomba memberikan insentif bunga simpanan yang tinggi demi menarik nasabah. Padahal bunga simpanan yang tinggi tentu memiliki risiko. Nasabah perlu mengetahui ketentuan simpanan yang dijamin dan tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Oleh karena itu, tingkat suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh bank digital sekiranya perlu diatur. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pasar perbankan yang sehat.

Atensi DPR

Dalam rangka menciptakan pasar perbankan yang sehat maka dalam hal ini DPR RI khususnya Komisi XI perlu mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengaturan mengenai penetapan suku bunga bank digital. Komisi XI perlu mengingatkan OJK dan LPS untuk saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan bank digital yang semakin pesat.

Selain itu, Komisi XI juga perlu memberikan atensi kepada OJK dan LPS untuk memastikan bank digital harus terbuka kepada nasabah mengenai ketentuan simpanan yang dijamin dan tidak dijamin oleh LPS. Atensi lainnya yang dapat diberikan oleh Komisi XI adalah memastikan bank digital selalu menjalankan fungsi intermediasinya dan mendorong perluasan inklusi keuangan terutama dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti saat ini.

Sumber

cnnindonesia.com, 17 Mei 2022;
finance.detik.com, 12 & 13 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.